PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

RANCANGAN AKHIR RENSTRA TAHUN 2025-2029

http://bkpsdm@pemkab-tanjungjabungbarat.go.id Jalan Gatot Subroto | Menunggal II | No.05 Telp/ Fax (0742) 323664, Kuala Tungkal - Jambi Kode Pos : 36516

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya sehingga rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan rencana strategis ini. Semoga rencana strategis ini dapat dipedomani, sehingga arah kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat terlaksana dengan baik.

Kuala Tungkal, September 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

SALDI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19730306 200501 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM
2.1. Gambaran Pelayanan BKPSDM
a. Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDM 8
b. Sumber Daya Organisasi 15
c. Kinerja Pelayanan Organisasi 16
d. Kelompok Sasaran Pelayanan 23
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 23
b. Isu Strategis sesuai Lingkungan Dinamis 23
c. Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD 24
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Jangka Menengah 27
3.2 Sasaran Jangka Menengah 28
3.3 Strategi 30
3.4 Kebijakan 30
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 34
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 60
BAB V. PENUTUP 63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance/GCG) dibutuhkan suatu tahapan perencanaan strategis dan terstruktur guna mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi perangkat daerah. Perencanaan strategis merupakan pedoman fundamental dan penting pada suatu organisasi sektor bisnis maupun sektor publik yang menentukan seluruh strategi atau arahan di dalam setiap pengambilan keputusan melalui pengalokasian seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai sebuah alat manajemen keberhasilan suatu perangkat daerah di dalam mencapai tujuan atau proyeksi suatu kondisi yang diinginkan di masa depan sangat ditentukan oleh seberapa baik kualitas perencanaan strategis yang ditetapkan.

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan bersifat indikatif, menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya yang ada dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 – 2029 dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Orientasi perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus mengakomodir amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai Peraturan Pemerintah lain

sebagai landasan dalam menentukan kebijakan manajemen dan tata kelola Aparatur Sipil Negara secara simultan dalam rangka mengimplementasikan rancangan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur, sebagaimana esensi dari reformasi birokrasi yakni integritas, etos kerja dan gotong royong diharapkan dapat memperoleh manfaat sebuah implementasi birokrasi yang di dalamnya menggambarkan proses demokratisasi, efektivitas dan efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas serta tanggungjawab dalam kerangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuisia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat mencapai target tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 33),

14. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dearah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai acuan arah penyusunan kebijakan lima tahun kedepan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RPJMD) Tahun 2025 - 2029.

b. TUJUAN

Tujuan Penyusunan perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2026;
2. Membangun sistem akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu upaya penerapan prinsip – prinsip pemerintah yang baik.

3. Menjadi Pedoman dan alat pengendalian kinerja dan instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dearah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, yaitu:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDM
   b. Sumber Daya BKPSDM
   c. Kinerja Pelayanan BKPSDM
   d. Kelompok Sasaran Layanan BKPSDM
2. Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM
   a. Permasalahan Pelayanan BKPSDM
   b. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategi BKPSDM
3.2 Sasaran Rencana Strategi BKPSDM
3.3 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program
4.2. Kegiatan
4.3. Sub Kegiatan
4.4. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

2.1 Gambaran Pelayanan BKPSDM

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Bab ini disusun dengan maksud menguraikan gambaran umum tentang kondisi daerah masa kini, dengan memberikan perhatian utama pada bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur yang akan diimplementasikan melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Kondisi Kepegawaian dalam hal ini mengacu pada kepegawaian sebagai suatu sistem penyelenggaraan manajemen PNS, termasuk didalamnya Aparatur Sipil Negara sebagai Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mutasi Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur, serta Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1) koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja;
2) pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
3) pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
4) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

5) pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas dua sub bagian :

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Progam.

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset dan Perlengkapan, kerja sama, kehumasan dan ketatalaksanaan, serta urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pekerjaan :
   a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
   b) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
   c) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas dan penataan kearsipan;
   d) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP);
   e) Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

f) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), peebendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;

g) Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;

h) Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;

i) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan

j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang memiliki uraian tugas pekerjaan :

a) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;

b) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;

c) melakukan penyiapan dan mengumpulkan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;

d) melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;

e) melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;

f) melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi. Bidang Mutasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas bidang mutasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja Bidang Mutasi;
b. penyiapan petunjuk dan pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi mutasi, promosi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, pengangkatan, pelantikan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, serta pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama;
c. penyiapan petunjuk dan pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional tertentu meliputi menyiapkan dan memverifikasi pengangkatan, pemindahan, pembebasan dan pemberhentian serta pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional;
d. penyiapan petunjuk dan pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan memverifikasi proses penilaian kinerja aparatur, kenaikan pangkat, pengelolaan pengembangan karier dan kepangkatan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. Bidang Pengembangan dan Kompetensi Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang pengembangan kompetensi aparatur;
b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakaan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi penyiapandaftar kebutuhan diklat, menyiapkan data calon peserta dan pelaksanaan diklat penjenjangan;
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakaan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi daftar kebutuhan diklat teknis dan fungsional, menyiapkan data calon peserta dan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional;
d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan uji kompetensi, kebijakaan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi penyusunan pedoman standar dan pengembangan kompetensi aparatur, penyiapan administrasi izin belajar dan tugas belajar, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyusun program, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan, menyelenggarakan, memfasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian. Dalam melaksanakan

tugas Bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian;
b. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantaun dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan, pengadaan PNS, PPPK dan status kepegawaian, penyiapan dokumen pengadaan dan status kepegawaian, rencana pembinaan aparatur, evaluasi kehadiran dan penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantaun dan evaluasi rencana pengembangan Simpeg, menghimpun, menyusun, mengelola data base, dokumentasi dan informasi kepegawaian dan menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantaun dan evaluasi kelembagaan profesi ASN, pemberian bantuan hukum dan penghargaan, mengelola pembuatan karis/karpeg/karsu/kartu anggota ASN; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.1

STRUKTUR ORGANISASIBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

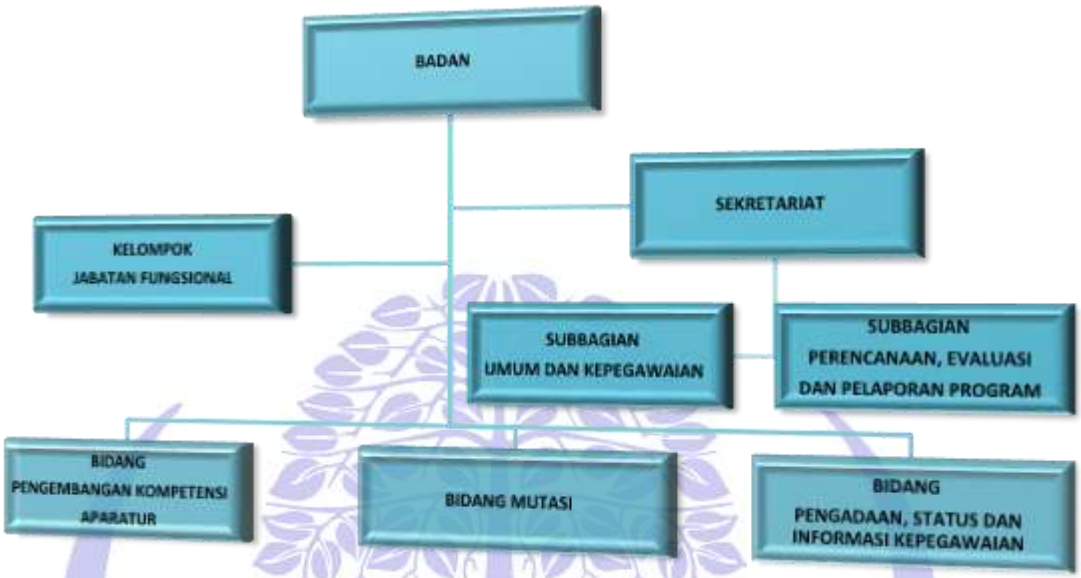

b. Sumber Daya Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang dan 2 (Dua) Kasubbag. adapun jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 35 orang, yang terdiri dari:

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1.	**Jumlah pegawai berdasarkan Eselon:**			
	1) Eselon II	1	1	-
	2) Eselon III	3	1	2
	3) Eselon IV	2	2	-

2. Jumlah pegawai berdasarkan jumlah pendidikan

1)	S.3	-	-	-
2)	S.2	1	1	-
3)	S.1/DIV	22	13	9
4)	D. III	1	-	1
5)	SLTA	6	5	1

3. Jumlah pegawai berdasarkan status :

1)	PNS	30	19	11
2)	PPPK	2		2
3)	Non PNS	28	13	15

Tabel 2.3
Rekapitulasi Aset

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	*2*	*3*
1.	Tanah	1.503.675.000
2.	Peralatan dan Mesin	2.588.424.050
3.	Gedung dan Bangunan	7.246.476.265
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	214.164.184
5.	Aset Tetap Lainnya	-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	11.814.000
	TOTAL	**960.091.000**

c. Kinerja Pelayanan Organisasi

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 202 - 2026 dan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang telah dijalankan melalui Program Kepegawaian Daerah yaitu:

1. Indeks Profesionalitas ASN;
2. Persentase Penetapan Jabatan sesuai Kompetensi;
3. Rasio Pejabat Fungsional

Rata-rata Indikator tersebut mengalami peningkatan kinerja dari target yang ditentukan dari Tahun 2021-2026, hal ini membuktikan bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Cukup Baik. Meskipun terdapat 1 Indikator yang mengalami penurunan ditahun 2024 yaitu Indikator Persentase Penetapan Jabatan sesuai Kompetensi, hal ini dikarenakan Keterbatasan PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Struktural dari Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 S/D 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	**Indeks Profesionalitas ASN**	**65**	**68**	**71**	**73**	**48,9**	**51,0**	**76,6**	**76,1**	**75,2**	**75,0**	**107,9**	**104,2**
2	**Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi (%)**	**92**	**92**	**92**	**92**	**81,5**	**87,1**	**85,9**	**82,9**	**88,6**	**94,7**	**93,4**	**90,1**
3	**Rasio Pejabat Fungsional Tertentu (%)**	**53,9**	**55,9**	**56,3**	**56,7**	**60,8**	**69**	**78,4**	**80,8**	**112,7**	**123,4**	**139,3**	**142,5**

TABEL 2.5
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA BKPSDM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2O24

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7,3%	8,2%	9,2%	10,3%	8,2%	10,3%	13,1%	13,9%	112,4 %	125,8 %	142,4 %	135 %
2.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	35,0%	35,6%	36,3%	36,8%	34,8%	54,4%	58,0%	59,4%	98,4%	152,7 %	159,9 %	161,5 %
3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37	37	37	37	29	37	24	33	78,4%	100%	64,9%	89,2%
4.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1534	1534	1534	1534	1148	827	827	827	74,8%	53,9%	53,9%	53,9%
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2163	2300	2421	2476	2347	2528	2776	2651	108,5 %	109,9 %	114,7 %	
6.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71%	74%	77%	80%	73,8%	72,8%	74,6%	74,31%	103,9 %	98,4%	96,9%	92,9%
7.	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,9%	13,4%	21,3%	24,7	20,9%	27,8%	32,8%	34,36%	265,3%	206,9%	153,8%	139,2%
8.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	70%	85%	85,3%	88,3%	28,4%	25,5%	23,9%	31,70%	40,6%	30%	28%	35,9%

TABEL 2.5

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 S/D 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	PROGRAM KEPEGAWAIAN	**4.461.731.551**	**2.390.934.891**	**3.375.425.100**	**3.232.528.400**	**1.638.065.982**	**1.437.588.650**	**2.188.128.700**	**2.389.663.050**	**36,7**	**60,1**	**64,8**	**73,9**
	Pengembangan Kompetensi ASN	**3.934.143.709**	**1.945.191.945**	**1.869.497.400**	**1.614.191.000**	**1.428.866.582**	**867.204.950**	**1.324.222.300**	**1.326.489.400**	**36,3**	**44,6**	**70,8**	**82,2**
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.836.561.000	987.467.250	185.764.200	157.107.000	515.133.857	595.093.450	174.489.700	131.946.000	18,2	60,3	93,9	84,0
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	909.193.157	199.061.500	160.873.000	170.090.200	795.225.225	99.895.000	60.691.000	175.690.200	87,5	50,2	37,7	103,3
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	155.949.859	703.598.500	273.433.900	645.993.800	80.557.500	123.331.500	239.380.900	112.479.200	51,7	17,5	87,5	17,4
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			1.191.476.300	592.400.000			812.855.700	874.974.000			68,2	147,7
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	32.439.693	55.064.695			37.950.000	48.885.000			117,0	88,8		
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam			57.950.000	48.600.000			36.805.000	31.400.000			63,5	64,6

	Jabatan Fungsional												
	Mutasi dan Promosi ASN	**356.034.275**	**314.876.475**	**511.787.800**	**1.048.652.200**	**69.780.000**	**408.195.000**	**348.519.800**	**569.568.000**	**19,6**	**129,6**	**68,1**	**54,3**
	Pengelolaan Promosi ASN	356.034.275	279.634.275	51.125.000	51.425.000	69.780.000	373.395.000	41.005.000	65.200.000	19,6	133,5	80,2	126,8
	Pengelolaan Mutasi ASN			432.762.800	976.085.000			286.514.800	483.560.800			66,2	49,5
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat		35.242.200	27.900.000	21.142.200		34.800.000	21.000.000	20.807.200		98,7	75,3	98,4
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**106.153.793**	**109.466.471**	**203.326.000**	**80.943.600**	**74.570.000**	**140.788.700**	**177.148.000**	**72.338.000**	**70,2**	**128,6**	**87,1**	**89,4**
	Pembinaan Disiplin ASN	21.850.000	22.677.876	163.908.000	29.485.600	21.650.000	22.447.200	143.880.000	30.310.000	99,1	99,0	87,8	102,8
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		18.945.500	19.568.000	17.768.000		18.021.500	16.193.000	17.768.000		95,1	82,8	100,0
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		19.024.750	19.850.000	33.690.000		19.000.000	17.075.000	24.260.000		99,9	86,0	72,0
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84.303.793	48.818.345			52.920.000	81.320.000			62,8	166,6		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**65.399.774**	**21.400.000**	**790.813.900**	**488.741.600**	**64.849.400**	**21.400.000**	**338.238.600**	**421.267.650**	**99,2**	**100,0**	**42,8**	**86,2**
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	14.549.974				14.049.600				96,6			

	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	21.350.000				21.350.000				100,0			
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			574.268.000	226.016.000			128.181.000	168.036.400			22,3	74,3
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			18.783.000	29.480.000			15.708.000	28.130.000			83,6	95,4
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.499.800	21.400.000	197.762.900	233.245.600	29.449.800	21.400.000	194.349.600	225.101.250	99,8	100,0	98,3	96,5

d. Kelompok Sasaran Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Kelompok sasaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN belum berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan transparan
2. Pengembangan Kompetensi ASN belum merata
3. Data Kepegawaian tidak Update
4. Rendahnya Kinerja ASN
5. Tingkat Disiplinan ASN masih rendah
6. Belum Optimalnya System Pelayanan Kepegawaian

b. Isu Strategis sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Nasional dan Regional)

Isu-isu yang menjadi fokus utama dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditingkat nasional maupun regional guna mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas untuk melayani masyarakat, antara lain:

1. Nasional
   - Peningkatan Profesional dan Kompetensi ASN
   - Penguatan Sistem Informasi ASN yang terintegrasi
   - Penerapan Meritokrasi dalam manajemen ASN untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
   - Pengendalian pengaruh politik terhadap netralitas ASN
   - Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Regional
   - Profesionalisme dan Integritas ASN
   - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Kepegawaian melalui teknologi digital
   - Reformasi Birokrasi yang belum optimal

c. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia aparatur sebagai motor penggerak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang epektif dan efesien.

Tabel 2.5
Isu Strategis BKPSDMD Kab. Tanjab Barat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU STRATEGIS
		NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Memaksimalkan potensi sumber daya manusia aparatur sebagai	✓ Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN belum berdasarkan kualifikasi, kompetensi,	• Peningkatan Profesional dan Kompetensi ASN	❖ Profesionalisme dan Integritas ASN	✓ Belum optimalnya implementasi manajemen

motor penggerak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang epektif dan efesien	dan kinerja secara adil dan transparan ✓ Pengembangan Kompetensi ASN belum merata ✓ Database Kepegawaian tidak update ✓ Rendahnya Kinerja ASN ✓ Tingkat kedisiplinan ASN masih rendah ✓ Belum Optimalnya System Pelayanan Kepegawaian	• Penguatan Sistem Informasi ASN yang terintegrasi • Penerapan Meritokrasi dalam manajemen ASN untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. • Pengendalian pengaruh politik terhadap netralitas ASN • Peningkatan kualitas pelayanan publik	❖ Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Kepegawaian melalui teknologi digital ❖ Reformasi Birokrasi yang belum optimal	ASN berdasarkan sistem merit ✓ Belum optimalnya peningkatan profesionalitas ASN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan isu strategis serta mempedomani prioritas nasional yang tercantum pada asta cita presiden dan wakil presiden.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang diformulasikan kedalam tujuan, sasaran, srategi dan arah kebijakan perangkat daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, setiap tujuan sasaran, srategi dan arah kebijakan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terwujud.

Adapun Visi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2025 – 2029 adalah

Visi

"Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah MADANI"

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan ber-Inovasi)

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan 3 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tentram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Dari tiga misi tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Tata Kelola Bidang Kepegawaian Kabupaten mendukung misi ke-dua yaitu berkah dalam peningkatan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik. Selanjutnya dari uraian diatas maka ditetapkan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

3.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan organisasi yang ditetapkan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan, makna penetapan tujuan organisasi adalah

a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, adapun tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

Tujuan

"Terwujudnya ASN yang Profesional, Berintegritas dan Adaftif

3.2. Sasaran Jangkah Menengah

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil dan memperhitungkan waktu. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran

1. ***Meningkatnya Manajemen ASN***
2. ***Meningkatnya Kualitas ASN***
3. ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah***

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
NSPK: Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur **Sasaran RPJMD**: - Meningkatnya Manajemen ASN	Terwujudnya ASN yang Profesional, berintegritas, dan Adaftif		Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM	71,9	72,5	73,5	74,5	76	78
		Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit	200	225	250	275	300	325
		Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	77,5	79	80,3	82	83,5	85
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP	79	80	81	82	83	84
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,7	89	90	90,2	90,3	90,5

3.3. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistic, rasional dan komprehensif, Dalam mengemban tugas dan kewenangannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memiliki pedoman/ acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata, maka strategi yang akan ditempuh oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efesien adalah:

1. Meningkatkan tata kelola manajemen ASN;
2. Meningkatkan pengembangan Profesionalisme ASN.

TABEL 3.4

PENAHAPAN RENSTRA

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
❖ Penyusunan Peta Jabatan dan Rencana Kebutuhan Pegawai untuk jangka menengah 5 Tahun ❖ Penyusunan Data kepegawaian secara lengkap dan realtime ❖ Penyusunan dan Penetapan Kebijakan tentang Manajemen ASN ❖ Pengembangan Kompetensi ASN berbasis Talenta ❖ Optimalisasi Layanan Kepegawaian berbasis Digital	➢ Pengadaan ASN ➢ Penyusunan tallent pool berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja ➢ Pengembangan Kompetensi ASN berbasis Talenta ➢ Pengembangan Layanan Kepegawaian berbasis Digital	✓Pengadaan ASN ✓Rencana Suksesi ✓Pengembangan Kompetensi ASN berbasis Talenta ✓Pengembangan Layanan Kepegawaian berbasis Digital	▪ Implementasi Sistem Merit ▪ Pengembangan Kompetensi ASN berbasis Talenta	• Implementasi Sistem Merit • Pengembangan Kompetensi ASN berbasis Talenta

3.4. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Untuk menunjang terlaksananya strategi tersebut, ditetapkan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Kebijakan I
    a. Penyusun Rencana Kebutuhan dan Pengadaan ASN
    b. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja ASN berbasis Reward and Punishmen yang terintegrasi
    c. Penyusunan dan Pemetaan Standar Kompetensi Jabatan
    d. Penyusunan dan Pengembangan Pola Karir dan Talent Pool
    e. Pelaksanaan Rencana Suksesi
    f. Penyediaan Pendampingan Bantuan Hukum bagi ASN
    g. Penyediaan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis Digital
2. Kebijakan II
    a. Pelaksanaan dan Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
    b. Memfasilitasi ASN dalam mengembangkan Kualifikasi Pendidikan
    c. Peningkatan Kualitas Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penilaian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan e-Kinerja
    d. Pengintegrasian Sistem Presensi dan Kinerja.
    e. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan berbasis kinerja

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur	✓ Menyusun analisis jabatan (Anjab)dan analisis beban kerja (ABK) secara berkala ✓ Melakukan perencanaan kebutuhan ASN jangka pendek, menengah, dan panjang ✓ Mengoptimalkan redistribusi ASN antar perangkat daerah dan unit kerja ✓ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen ASN ✓ Menyusun dan menerapkan pola karier ASN ✓ Mengembangkan sistem penilaian kinerja ASN berbasis e-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai elektronik) ✓ Meningkatkan kualitas perjanjian kinerja dan cascading kinerja ✓ Mendorong penerapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja individu (IKI)	▪ Penyusunan rencana Kebutuhan dan Pengadaan ASN ▪ Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja ASN berbasis Reward and Punishmen yang Terintegrasi ▪ Penyusunan dan Pemetaan Standar Kompetensi Jabatan ▪ Penyusunan dan Pengembangan Pola Karir dan Talent Pool ▪ Pelaksanaan Rencana Suksesi ▪ Penyediaan Pendampingan Bantuan Hukum bagi ASN ▪ Penyediaan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis Digital ▪ Pelaksanaan dan Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. ▪ Memfasilitasi ASN dalam mengembangkan Kualifikasi Pendidikan ▪ Peningkatan Kualitas Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penilaian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan e-Kinerja ▪ Pengintegrasian Sistem Presensi dan Kinerja. ▪ Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan berbasis kinerja	

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI			
Misi 1: Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya ASN yang Profesional, Berintegritas, dan Adaftif	Meningkatnya Manajemen ASN	Meningkatkan Tata Kelola Manajemen ASN	❖ Penyusunan rencana Kebutuhan dan Pengadaan ASN ❖ Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja ASN berbasis Reward and Punishmen yang Terintegrasi ❖ Penyusunan dan Pemetaan Standar Kompetensi Jabatan ❖ Penyusunan dan Pengembangan Pola Karier dan Talent Pool ❖ Pelaksanaan Rencana Suksesi ❖ Penyediaan Pendampingan Bantuan Hukum bagi ASN
	Meningkatnya Kualitas ASN	Meningkatkan Pengembangan Profesionalisme ASN	❖ Pelaksanaan dan Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. ❖ Memfasilitasi ASN dalam mengembangkan Kualifikasi Pendidikan ❖ Peningkatan Kualitas Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penilaian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan e-Kinerja ❖ Pengintegrasian Sistem Presensi dan Kinerja
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Optimalisasi Peningkatan Kinerja dan Sistem Pelayanan Kepegawaian	❖ Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan berbasis kinerja ❖ Penyediaan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis Digital

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Dengan program, kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 2 program, 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. **Program Kepegawaian Daerah**
   - **1.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
     - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
     - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
     - Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
   - **1.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**
     - Pengelolaan Promosi ASN
     - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
     - Pengelolaan Mutasi ASN

1.3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

1.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pembinaan Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.1. Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2.2. Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
KEPEGAWAIAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					**22.795.000.000**		**22.795.000.000**		**22.795.000.000**		**22.795.000.000**		**22.795.000.000**	**BKPSDMD TANJAB BARAT**
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Dokumen AKIP OPD (%)	100	100	100	22.795.000.000	100	22.795.000.000	100	22.795.000.000	100	22.795.000.000	100	22.795.000.000	BKPSDMD TANJAB BARAT
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Program Kepegawaian Daerah					**7.430.000.000**		**7.430.000.000**		**7.430.000.000**		**7.430.000.000**		**7.430.000.000**	**BKPSDMD TANJAB BARAT**
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pengisian Jabatan sesuai Kompetensi (%)	82,9	84	85	7.430.000.000	85	7.430.000.000	87	7.430.000.000	88	7.430.000.000	90	7.430.000.000	BKPSDMD TANJAB BARAT
	Tingkat Kedisiplinan ASN (%)	99,9	99,9	99,9		99,9		99,9		99,9		99,9		

Pendidikan dan Pelatihan														
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							**4.500.000.000**		**4.550.000.000**		**4.600.000.000**		**4.650.000.000**	**BKPSDMD TANJAB BARAT**
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	0,7	2,1	2,2	-	2,3		2,4		2,5		2,6		
	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)	1,4	1,4	1,6		1,8	4.500.000.000	2	4.550.000.000	2,2	4.600.000.000	2,4	4.650.000.000	BKPSDMD TANJAB BARAT

Tabel 4.2
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RESNTRA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
NSPK: Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur ***Sasaran RPJMD:*** ***-*** ***Meningkatnya Manajemen ASN***	**Terwujudnya ASN yang Profesional, berintegritas, dan Adaftif**	**Meningkatnya Manajemen ASN** **Meningkatnya Kualitas ASN**	**Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Efesiensi dan Efektivitas**		- Persentase Pemenuhan Dokumen AKIP - Persentase Pemenuhan Komponen SKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Kelengkapan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	

				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Meningkatnya Kualitas Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Kelengkapan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Administasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kelengkapan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat menyurat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kelengkapan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Kelengkapan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
NSPK:Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur	Terwujudnya ASN yang Profesional, Berintegrasi, dan Adaftif	Meningkatnya Manajemen ASN	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian		**Persentase Pengisian Jabatan sesuai Kompetensi**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	
					Tingkat Kedisiplinan ASN		
				Meningkatnya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	

Sasaran RPJMD: ***-*** ***Meningkatnya Manajemen ASN***				Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	
				Meningkatnya Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Pengelolaan Dokumen Mutasi dan Promosi**	**Mutasi dan Promosi ASN**	
				Terlaksananya Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pengelolaan Mutasi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
				Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	
				Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	

				Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
				Terlaksananya Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	
				Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
				Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	
				Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	
				Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
				Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
		Meningkatnya Kualitas ASN	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional		**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
					Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		

				Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Meningkatnya Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	**Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional**	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional**	
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

4.3. RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Efesiensi dan Efektivitas	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	11.686.000.000	100	22.795.000.000	100	26.960.000.000	100	27.045.000.000	100	27.225.000.000	100	27.305.000.000	Tanjung Jabung Barat
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	Tanjung Jabung Barat
Meningkatnya Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		14 Dok	14 Dok	60.000.000	14 Dok	65.000.000	14 Dok	65.000.000	14 Dok	70.000.000	14 Dok	70.000.000	14 Dok	70.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13 Laporan	13 Laporan	30.000.000	13 Laporan	30.000.000	13 Laporan	30.000.000	13 Laporan	30.000.000	13 Laporan	30.000.000	13 Laporan	30.000.000	Tanjung Jabung Barat

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**100%**	**100%**	**9.250.000.000**	**100%**	**10.250.000.000**	**100%**	**10.300.000.000**	**100%**	**10.300.000.000**	**100%**	**10.300.000.000**	**100%**	**10.300.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Meningkatnya Kelengkapan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Kelengkapan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		18 Laporan	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	50.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD													
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dok	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang	50 Orang	9.000.000.000	50 Orang	10.000.000.000	50 Orang	10.000.000.000	50 Orang	10.000.000.000	50 Orang	10.000.000.000	50 Orang	10.000.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN													

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**220.000.000**	**100%**	**270.000.000**	**100%**	**280.000.000**	**100%**	**290.000.000**	**100%**	**300.000.000**	Tanjung Jabung Barat
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya		4 Paket	3	100.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	5	140.000.000	5	150.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan														
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		46 Orang	46 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan														
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kelengkapan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Kelengkapan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	Tanjung Jabung Barat
Administasi Umum Perangkat Daerah															
Meningkatnya Administasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**1.041.000.000**	**100%**	**1.085.000.000**	**100%**	**1.100.000.000**	**100%**	**1.115.000.000**	**100%**	**1.130.000.000**	**100%**	**1.145.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		5 Paket	5 Paket	10.000.000	10 Paket	20.000.000	12 Paket	25.000.000	15 Paket	30.000.000	18 Paket	35.000.000	20 Paket	40.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		35 Paket	37 Paket	90.000.000	40 Paket	100.000.000	40 Paket	100.000.000	40 Paket	100.000.000	40 Paket	100.000.000	40 Paket	100.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4 Paket	5 Paket	6.000.000	2 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6 Paket	6 Paket	60.000.000	6 Paket	70.000.000	8 Paket	75.000.000	8 Paket	80.000.000	8 Paket	85.000.000	8 Paket	90.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan														
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Dok	1 Dok	25.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	50.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan														
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	850.000.000	Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Meningkatnya Kelengkapan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kelengkapan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**710.000.000**	**100%**	**810.000.000**	**100%**	**860.000.000**	**100%**	**910.000.000**	**100%**	**960.000.000**	**100%**	**1.010.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Penyediaan Jasa Surat menyurat														
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	Tanjung Jabung Barat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Tanjung Jabung Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	900.000.000	Tanjung Jabung Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**325.000.000**	**100%**	**1.295.000.000**	**100%**	**5.295.000.000**	**100%**	**5.300.000.000**	**100%**	**5.305.000.000**	**100%**	**5.310.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		20 Unit	21 Unit	250.000.000	21 Unit	260.000.000	21 Unit	260.000.000	21 Unit	265.000.000	21 Unit	270.000.000	21 Unit	275.000.000	Tanjung Jabung Barat

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	27 Unit	25.000.000	31 Unit	35.000.000	31 Unit	35.000.000	31 Unit	35.000.000	31 Unit	35.000.000	31 Unit	35.000.000	Tanjung Jabung Barat
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50.000.000	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	5.000.000.000	2 Unit	5.000.000.000	2 Unit	5.000.000.000	2 Unit	5.000.000.000	Tanjung Jabung Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Meningkatnya Kelengkapan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Kelengkapan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**9.000.000.000**	**100%**	**9.000.000.000**	**100%**	**9.000.000.000**	**100%**	**9.100.000.000**	**100%**	**9.100.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit			3 Unit	8.000.000.000	3 Unit	8.000.000.000	3 Unit	8.000.000.000	3 Unit	8.000.000.000	3 Unit	8.000.000.000	Tanjung Jabung Barat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	1 Unit	30.000.000	165 Unit	400.000.000	165 Unit	400.000.000	165 Unit	400.000.000	165 Unit	400.000.000	165 Unit	400.000.000	Tanjung Jabung Barat

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		7 Unit			1 Unit	600.000.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	600.000.000	10 Unit	700.000.000	10 Unit	700.000.000	Tanjung Jabung Barat
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan														
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH															
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	**Persentase Pengisian Jabatan sesuai Kompetensi**	**82,9%**	**84%**	**3.175.000.000**	**85%**	**7.430.000.000**	**87%**	**7.975.000.000**	**88%**	**7.985.000.000**	**89%**	**7.985.000.000**	**90%**	**7.995.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
	Tingkat Kedisiplinan ASN	**99,9%**	**99,9%**		**99,9%**		**99,9%**		**99,9%**		**99,9%**		**99,9%**		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**100%**	**100%**	**360.000.000**	**100%**	**1.535.000.000**	**100%**	**1.535.000.000**	**100%**	**1.545.000.000**	**100%**	**1.545.000.000**	**100%**	**1.545.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Meningkatnya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**														
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		4 Dok	5 Dok	200.000.000	5 Dok	225.000.000	5 Dok	225.000.000	5 Dok	235.000.000	5 Dok	235.000.000	5 Dok	235.000.000	Tanjung Jabung Barat
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		157 Dok	178 Dokumen	10.000.000	165 Dok	10.000.000	147 Dok	10.000.000	152 Dok	10.000.000	137 Dok	10.000.000	146 Dok	10.000.000	Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		9 Dok	1 Dok	150.000.000	9 Dok	1.300.000.000	1 Dok	1.300.000.000	1 Dok	1.300.000.000	1 Dok	1.300.000.000	1 Dok	1.300.000.000	Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK														

Mutasi dan Promosi ASN															
Meningkatnya Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Pengelolaan Dokumen Mutasi dan Promosi**	**100%**	**100%**	**970.000.000**	**100%**	**1.610.000.000**	**100%**	**1.620.000.000**	**100%**	**1.620.000.000**	**100%**	**1.620.000.000**	**100%**	**1.620.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Pengelolaan Mutasi ASN															
Terlaksananya Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dok	5 Dok	900.000.000	4 Dok	1.500.000.000	4 Dok	1.500.000.000	4 Dok	1.500.000.000	4 Dok	1.500.000.000	4 Dok	1.500.000.000	**Tanjung Jabung Barat**
Pengelolaan Promosi ASN															
Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dok	3 Dok	60.000.000	3 Dok	60.000.000	4 Dok	70.000.000	4 Dok	70.000.000	4 Dok	70.000.000	4 Dok	70.000.000	Tanjung Jabung Barat
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN															
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dok	500 Dok	10.000.000	500 Dok	50.000.000	500 Dok	50.000.000	500 Dok	50.000.000	500 Dok	50.000.000	500 Dok	50.000.000	Tanjung Jabung Barat
Pengembangan Kompetensi ASN															
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN**	**100%**	**100%**	**1.775.000.000**	**100%**	**3.920.000.000**	**100%**	**4.450.000.000**	**100%**	**4.450.000.000**	**100%**	**4.450.000.000**	**100%**	**4.450.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN															
Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	125 Org	40 orang	25.000.000	45 orang	700.000.000	50 orang	1.000.000.000	55 orang	1.000.000.000	58 orang	1.000.000.000	60 orang	1.000.000.000	Tanjung Jabung Barat
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN															

Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dok	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	Tanjung Jabung Barat
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN															
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	11 Org	207 Orang	1.200.000.000	200 Orang	1.500.000.000	200 Orang	1.700.000.000	200 Orang	1.700.000.000	200 Orang	1.700.000.000	200 Orang	1.700.000.000	Tanjung Jabung Barat
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional															
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	148 Org	20 Orang	350.000.000	85 Orang	1.500.000.000	85 Orang	1.500.000.000	85 Orang	1.500.000.000	85 Orang	1.500.000.000	85 Orang	1.500.000.000	Tanjung Jabung Barat
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional															
Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	82 Org	26 Orang	50.000.000	75 Orang	50.000.000	75 Orang	50.000.000	75 Orang	50.000.000	75 Orang	50.000.000	75 Orang	50.000.000	Tanjung Jabung Barat
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**100%**	**70.000.000**	**100%**	**365.000.000**	**100 %**	**370.000.000**	**100%**	**370.000.000**	**100%**	**370.000.000**	**100%**	**380.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Pembinaan Disiplin ASN															
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2 Org	3 Org	10.000.000	3 Org	300.000.000	3 Org	300.000.000	3 Org	300.000.000	3 Org	300.000.000	3 Org	300.000.000	Tanjung Jabung Barat
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai															Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	4 Dok	8 Dok	10.000.000	8 Dok	10.000.000	8 Dok	10.000.000	8 Dok	10.000.000	8 Dok	10.000.000	8 Dok	10.000.000	
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		190 Org	150 Orang		150 Orang	55.000.000			150 Orang		150 Orang		150 Orang	70.000.000	

Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa			50.000.000			150 Orang	60.000.000		60.000.000		60.000.000			Tanjung Jabung Barat
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**	**0,7**	**2,1**	-	**2,2**		**2,3**	**4.500.000.000**	**2,4**	**4.550.000.000**	**2,5**	**4.600.000.000**	**2,6**	**4.650.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	**1,4**	**1,4**		**1,6**		**1,8**		**2**		**2,2**		**2,4**		
Pengembangan Kompetensi Teknis		**100%**					**100 %**	**2.000.000.000**	**100%**	**2.050.000.000**	**100%**	**2.100.000.000**	**100%**	**2.150.000.000**	**Tanjung Jabung Barat**
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis**														
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		100 Org					150 Org	2.000.000.000	175 Org	2.050.000.000	200 Org	2.100.000.000	220 Org	2.150.000.000	Tanjung Jabung Barat
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi														

Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional														
Meningkatnya Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	**Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional**	100%				-	100 %	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	**Tanjung Jabung Barat**
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan					4 Laporan	2.500.000.000	4 Laporan	2.500.000.000	4 Laporan	2.500.000.000	4 Laporan	2.500.000.000	Tanjung Jabung Barat
				14.861.000.000		**30.225.000.000**		**39.435.000.000**		**39.580.000.000**		**39.810.000.000**		**39.950.000.000**	

Tabel 4.4

DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PROGRAM PERIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan urusan Pemerintah dan Pelayanan Publik	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan dan Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sosialisasi Peraturang Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

			Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengisian Jabatan sesuai Kompetensi	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	
		Tingkat Kedisiplinan ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	
			Mutasi dan Promosi ASN	
			Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengembangan Kompetensi ASN	
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pembinaan Disiplin ASN	
			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	

	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi
			Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

4.2 Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrumen penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, bobot masing - masing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact).

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan perangkat daerah. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Selanjutnya sebagai komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki indikator kinerja yang akan medukung pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 -2029.

Berikut merupakan tabel Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai hingga Tahun 2030 yang menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 dan selanjutnya disajikan tabel indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-N						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
1.	Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks	200	225	250	275	300	325	
2.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,5	79	80,3	82	83,5	85	
3.	Nilai AKIP OPD		79	80	81	82	83	84	
4.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		88,7	89	90	90,2	90,3	90,5	

Tabel 4.6

Indikator Kinerja BKPSDM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	SATUAN	Target Capaian Setiap Tahun						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	
3.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	37	37	37	37	37	37	
4.	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	497	497	497	497	497	497	
5.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Jabatan	3021	3211	3107	2994	2888	2778	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 serta merupakan perwujudan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah dokumen perangkat daerah untuk perencanaan periode 5 tahun yang digunakan menjadi panduan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menentukan langkah kerja yang akan dilakukan sehingga konsisten dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar mampu senantiasa mengikuti setiap perubahan lingkungan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumberdaya yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis sangat ditentukan oleh kesamaan tujuan, sasaran dan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun sebagai bahan rujukan dalam pemantapan perumusan kebijakan 5 tahun kedepan dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.